

KONSEP DAKWAH POLITIK MOHAMMAD NATSIR DI INDONESIA

Sri Harda Yanti, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
Email: hardayanti.shy@gmail.com

M. Fatchurrohman, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
Email: mfatchur@dosen.iimsurakarta.ac.id

Herri Gunawan, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta
Email: herrigunawan82@gmail.com

Abstract

This research is included in library research with a socio-historical approach. This research is included a qualitative research. This research belongs to the type of historical study through the study of documents or texts. This study discusses the concept of Mohammad Natsir's political da'wah and his methods and strategies aimed at grounding and reintroducing the concept. Sources of data in this research consisted of primary and secondary sources of books/writings. This research data collection through documentation using content analysis techniques. The results of this research indicated that in political da'wah activities, Mohammad Natsir had the concept of modernization in Islamic politics. The essence of Natsir's concept of political modernism is to apply the teachings of Islamic spiritual, social and political values contained in the Qur'an and Hadith, but still adapted and be opened to the period of times. Natsir carried out political da'wah with three methods, namely through the government field, the government field and the community development field. Natsir's political da'wah method was carried out using a da'wah strategy with actions, in writing, and orally. The implications of this research are expected to be the development of broader da'wah theories, especially those related to political da'wah in Indonesia.

Keywords: Concept, Da'wah, Politics

Abstrak

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan pendekatan sosio-historis. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis studi sejarah melalui studi dokumen atau teks. Kajian ini membahas tentang konsep dakwah politik Mohammad Natsir serta metode dan strateginya yang bertujuan untuk membumikan dan memperkenalkan

kembali konsep tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder berupa buku/tulisan. Pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan dakwah politik, Mohammad Natsir memiliki konsep modernisasi dalam politik Islam. Inti dari konsep modernisme politik Natsir adalah menerapkan ajaran nilai-nilai spiritual, sosial dan politik Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun tetap disesuaikan dan dibuka dengan perkembangan zaman. Natsir melakukan dakwah politik dengan tiga metode yaitu melalui bidang pemerintahan, bidang pemerintahan dan bidang pembangunan masyarakat. Metode dakwah politik Natsir dilakukan dengan menggunakan strategi dakwah dengan tindakan, tertulis, dan lisan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat berkembangnya teori-teori dakwah yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan dakwah politik di Indonesia.

Kata Kunci: Konsep, Dakwah, Politik

PENDAHULUAN

Islam adalah agama dakwah. Dakwah merupakan sebuah cara yang ditempuh oleh para nabi, rasul, serta para ulama. Dakwah adalah salah satu ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah *Sholallahu alaihi wasallam*. Posisi dakwah dalam Islam sangat penting peranannya, sebab melalui dakwah ajaran Islam dapat tersebar secara luas. Dakwah dilakukan untuk mengajak manusia ke jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak hanya mengajak ke jalan Allah SWT, tapi juga mengajak manusia kepada keadilan dan kedamaian yang *kaffah* (menyeluruh). Dakwah kepada Allah SWT merupakan jalan mulia dan utama. (Arif M Ikhsan, 2017: 19).

Dakwah Rasulullah SAW hadir membawa perubahan-perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Arab.

Rasulullah SAW berhasil merubah kesenjangan sosial yang ada, serta mengganti sistem yang ada dimasyarakat Arab, seiring dengan dakwahnya untuk mengajak kepada Allah SWT. Rasulullah SAW adalah seorang sosialis yang merubah kesenjangan yang ada dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan sesungguhnya berdasarkan sejauh mana ketaatannya kepada Allah SWT.

Sebelum Rasulullah SAW datang, bangsa Arab tidak memiliki kesatuan, secara politis merupakan bangsa yang terpecah belah. Rasulullah SAW sebagai juru dakwah, tidak hanya menjadi pendiri agama, namun juga menjadi negarawan dan pembangun bangsa yang besar. Bahkan Rasulullah SAW mendirikan Republik Madinah dengan Piagam Madinah sebagai kitab undang-

undang yang mengatur berbagai suku yang ada. Piagam Madinah yang Rasulullah SAW buat untuk menjadi solusi dari perpecahan dan pertikaian antara Islam dan Yahudi yang kerap terjadi. Piagam Madinah menjadi jaminan hak bagi setiap manusia tanpa melihat latar belakang suku ataupun statusnya dalam masyarakat.

Syed Mahmudunnasir menjelaskan bahwa di Madinah Rasulullah SAW memulai dakwah dengan membawa Islam dalam konsep agama-politik setelah sebelumnya Islam hanya menjadi agama murni. Rasulullah SAW membangun persaudaraan muslim serta mendirikan suatu negara atas prinsip-prinsip kesamaan dan kebebasan. Bangsa Arab, Yahudi dan semua masyarakat yang ada di tanah Arab berada pada satu pijakan dan derajat yang sama dalam struktur sosio-politik, tanpa ada prasangka-prasangka nasional dan rasial dalam bermasyarakat.

Syed Mahmudunnasir di atas tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW, lebih lanjut memberikan gambaran tentang bagaimana suatu tantangan dakwah yang dialami seorang *da'i* dalam perjalanan dakwahnya. Tantangan yang dihadapi dapat berupa berbagai hal dan dari beragam aspek kehidupan. Mulai dari hal mendasar terkait *aqidah* (kepercayaan), masalah-masalah sosial, bahkan sampai pada tatanan dan struktur politik. Tantangan dakwah dari berbagai aspek muncul baik secara

individu, keluarga atau kelompok, dan juga menyeluruh sampai pada konteks kenegaraan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, maka ketajaman berpikir *da'i* juga diuji untuk mampu menganalisa berbagai masalah yang ada dan menemukan solusinya.

Kebijaksanaan dan ketajaman berpikir Rasulullah SAW diikuti oleh para *da'i* setelahnya diberbagai kurun waktu dan tempat, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, ada satu ulama yang perjuangannya di jalan dakwah mengingatkan ummat Islam kepada perjuangan dan jalan dakwah Rasulullah SAW, karena keteguhannya mengikuti cara-cara dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, serta kebijaksanaan dan ketajaman berpikirnya dalam merespon tantangan dakwah kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ulama sekaligus *da'i* tersebut adalah Mohammad Natsir, atau dikenal dengan panggilan Natsir.

Mohammad Natsir (1908-1993) adalah seorang *da'i* serta seorang pejuang nasional di Indonesia. Natsir adalah seorang ulama, cendekiawan, negarawan dan juga seorang pemimpin ummat. Natsir sepanjang hidupnya pernah menjadi guru, Menteri, menjadi Perdana Menteri setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, serta seorang politikus Islam yang dengan tegas dan secara bijaksana membawa pesan dakwah serta menggerakkan kekuatan Islam. Bagi Natsir, dakwah adalah medan perjuangan yang harus

ditempuh dan terus berlangsung hingga akhir zaman (Hadi Nur Ramadhan, 2021: 13-17).

Studi tentang pemikiran maupun aktifitas dakwah dan politik Mohammad Natsir ini menjadi sangat menarik dan penting untuk diteliti secara mendalam untuk memahami sekaligus memperkenalkan konsep, metode dan strategi dakwah politik Mohammad Natsir. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengangkat dan menghidupkan kembali konsep dakwah politik Natsir. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi para *da'i* untuk dapat mengikuti kebijaksanaan sikap serta ketajaman berpikir Mohammad Natsir dalam mengemban tugas dakwah.

LANDASAN TEORI

Dakwah

Kata dakwah dalam Al-Qur'an yaitu dari kata دعا - يدعو - دعوة, secara etimologi (secara Bahasa) mempunyai makna yang sama dengan kata *al nida* yang berarti memanggil atau menyeru. Al-Qur'an menyebutkan kata ini sebanyak 215 kali, hal ini menurut informasi peneliti Al-Qur'an yaitu Muhammad Fuad Abd. al-Baqy. Ada lima makna yang terkandung dalam kata tersebut, yaitu: 1) berarti meminta pertolongan (الاستغاثة), 2) berarti menghambakan diri (*ibadah*), 3) berarti memanjatkan permohonan kepada Allah SWT (*berdoa*), 4) berarti persaksian Islam (*syahadat al Islam*), 5) berarti mengundang atau memanggil

(*al nida*) (Ilyas Ismail dan Prio Hotman, 2011: 28).

Mohammad Ali Aziz menjelaskan bahwa penelusuran makna dakwah di dalam Al-Qur'an dilakukan secara semantik. Melalui cara tersebut, didapati makna bahwa dakwah itu bersifat persuasif yakni mengajak manusia secara halus. Jika yang dilakukan untuk mengajak seseorang kepada Islam dilakukan dengan cara kekerasan, pemaksaan ancaman, terror atau intimidasi, maka tidak bisa dikatakan sebagai dakwah. Pemahaman inilah yang diperoleh dari makna dakwah yang berarti mengajak, berdoa, mengadu, mengundang, meminta dan memanggil, dimana doa berarti permohonan dari hamba kepada Tuhannya (Moh Ali Aziz, 2004: 274).

Al-Qur'an memberikan gambaran secara jelas terkait aktifitas mengajak ke jalan Islam, hal ini tertera dalam surat Fushshilat (41) ayat 33 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal sholeh dan berkata: sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.* (QS. Fushshilat [41]: 33).

Dari ayat di atas terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menjalankan aktifitas dakwah, yaitu *dakwah bil qaul* (dakwah dengan perkataan) dan *dakwah bil amal* (dakwah dengan perbuatan). *Dakwah bil qaul* bisa dilakukan secara kelompok, massa atau secara individu. *Dakwah bil amal* yaitu aktifitas dakwah yang dilakukan dengan cara *sosial engineering* (rekayasa sosial). Memerlukan adanya manajemen agar koordinasi antara *dakwah bil qaul* dan *dakwah bil amal* berjalan secara efektif.

Dalam pandangan terminologi sosiologi pembangunan, dakwah dalam arti makro itu sejalan dengan rekonstruksi sosial. Sosial dalam arti ekonomi, budaya, Pendidikan, dan kemasyarakatan. Persoalan dakwah adalah sesuatu yang kompleks karena menyangkut segala aspek kehidupan dan berkaitan dengan upaya perbaikan yang tidak pernah selesai. Maka pengertian dakwah dalam konteks ini adalah upaya memperkenalkan Islam sebagai satu-satunya jalan Islam yang benar, dengan cara yang menarik, bebas, demokratis, dan realistik menyentuh kebutuhan primer manusia (Asep Muhiddin, 2002: 36).

Ismail Ilyas dan Hotman Prio menjabarkan dalam konteks filsafat, bahwa dakwah dapat dipahami dalam tiga makna mulai dari makna yang paling sederhana hingga makna yang paling tinggi. Pertama, filsafat dakwah adalah suatu konsep atau bagan pemikiran yang menerangkan dasar-

dasar, prinsip-prinsip dan hal-hal yang dianggap paling pokok mengenai dakwah. Kedua, filsafat dakwah adalah pemikiran atau kajian yang bersifat rasional dan filsufis mengenai prinsip-prinsip dakwah yang digali dari sumber-sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist serta pemikiran para ulama sebagai pegangan dasar bagi para da'i dalam melaksanakan tugas dakwah demi mencapai mardhatillah (ridho Allah SWT). Ketiga, filsafat dakwah merujuk pada konsep-konsep atau aliran-aliran pemikiran mengenai dakwah yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan paradigmatis (pola pemikiran) tentang hal-hal pokok mengenai dakwah. Filsafat dakwah dalam arti yang ketiga ini berkaitan dengan mazhab-mazhab pemikiran dalam dakwah yang dengan sendirinya memperkaya wacana dan khazanah intelektual mengenai dakwah. Dalam konteks kajian filsafat dakwah terdapat prinsip-prinsip yang fundamental dalam pemikiran dakwah. Prinsip tersebut ada lima yaitu Islam, paradigma tentang dakwah, da'i, mad'u (obyek dakwah), dan aliran-aliran pemikiran dalam dakwah. Inilah obyek utama dalam kajian filsafat dakwah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah sebuah aktifitas menyeru kepada jalan Islam, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*. Segala kegiatan yang bertujuan untuk mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah

aktifitas dakwah, baik dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan. Aktifitas dakwah tidak hanya dimaknai dan dipandang secara murni dari aspek keagamaan saja, tapi mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada aspek yang bebas dari aktifitas dakwah. Ruang lingkup dakwah sangat luas, mulai dari individu, keluarga, kelompok masyarakat bahkan hingga ke tatanan kenegaraan dalam pendekatan struktural.

Politik

Politik diambil dari kata polis dalam bahasa Yunani Kuno yang artinya kota. Kota dalam bahasa itu adalah Negara yang berkuasa, menurut istilah sekarang. Kata politik berasal dari bahasa Inggris yaitu politia yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan, secara makna, kata tersebut berarti *acting or judging wisely* (menyikapi dan menghukumi dengan bijak). Politik secara lughah (bahasa), berasal dari kata 'sasa-yasuusu-siyasatan' atau yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al-Muhits mengatakan bahwa, *Sustu ar-ra'iyata siyasatan* atau berarti saya memerintahnya dan melarangnya (Fachruddin dan Fuad Muhammad, 1988: 1).

Agus Hiplunuddin menjelaskan bahwa politik secara umum erat kaitannya dengan kekuasaan, dan terminologi politik tentang kekuasaan biasanya erat melekat dengan negara. Orang-orang yang masuk dalam dunia

politik yang sedang merebut atau mempertahankan kekuasaannya baik itu pada lembaga eksekutif ataupun legislatif disebut sebagai politisi. Negara dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kelompok, organisasi, alat, kelembagaan dari rakyat, keluarga atau persekutuan (Agus Hiplunuddin, 2017: 7).

Konsep politik dalam Islam secara jelas diungkapkan dalam teks-teks Al-Qur'an yang menyebutkan sejumlah prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, kejujuran, amanah serta penegakan hukum. Selain itu, konsep-konsep dan dasar-dasar politik dalam Islam juga dapat dilihat dari praktek politik Rasulullah SAW dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, yaitu tentang bagaimana Rasulullah ketika menjalankan fungsi pemerintahan di Madinah (Ayi Sofyan, 2012: 16).

Penjabaran di atas memberikan gambaran bahwa aktifitas politik bukanlah sesuatu yang hanya dipandang dalam konteks negara saja namun juga dari segi keagamaan. Islam sendiri telah menaruh perhatian terhadap politik. Politik bahkan telah terlaksana dan menjadi bagian dakwah Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan aktifitas-aktifitas politik sesungguhnya tidak boleh dipisahkan dari persoalan agama.

Dakwah Politik

Dakwah politik merupakan dakwah yang dilaksanakan melalui pendekatan struktur politik atau melalui kekuasaan. Dakwah politik juga sering disebut dengan dakwah struktural, yaitu dakwah yang pelaksanaannya memanfaatkan susunan jabatan, pangkat atau kedudukan dari seorang *da'i* atau *mad'u*. Struktur tersebut dapat berupa kepemimpinan. Hampir semua nabi dan rasul berdakwah dengan pendekatan ini. Semua agama yang berkembang dibawah lindungan negara serta pemerintahan, sehingga negara tersebut menjamin aktifitas dakwah itu, serta bertanggung jawab melindungi penyebar luasannya A. Ghaffar Aziz (dalam Mokhammad Abdul Aziz, 2018: 40).

Dengan demikian, juru dakwah yang berasal dari latar belakang kehidupan dan profesi yang berbeda sebenarnya tidak ada masalah asalkan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan ajaran Islam. Dakwah dapat berlangsung dalam kehidupan manusia, termasuk dalam arena politik kenegaraan. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik dakwah tidak lain dari segala jenis kegiatan manusia yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu medium untuk mencapai tujuan dakwah. Bukan sebaliknya, dakwah justru dijadikan medium untuk mencapai tujuan politik (Awaludin Pimay, 2005: 8-9).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah politik adalah sebuah aktifitas dakwah yang dilakukan melalui jalur politik. Kekuasaan yang ada dalam aspek politik digunakan untuk menyebarkan dan mendakwahkan nilai-nilai Islam. Penggunaan kekuasaan yang digunakan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dimulai dari tingkat kekuasaan yang paling kecil hingga kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun perlu diketahui bahwa sesungguhnya penggunaan kekuasaan bukanlah satu-satunya cara untuk berdakwah. Sehingga bukan masalah bagi seorang *da'i* apabila tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam masyarakat atau negara.

Sebagai produk budaya, dakwah tidak terlepas dari dunia politik. Setidaknya, ada tiga paradigma terkait hubungan dakwah dan politik, yakni paradigma simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik. Paradigma simbiotik memandang bahwa dakwah dan politik saling memerlukan secara timbal balik. Dalam hal ini, dakwah memerlukan politik, karena dengan politik, dakwah dapat berkembang. Inilah yang disebut dengan berdakwah dengan politik. Sebaliknya, politik memerlukan dakwah, karena dengan dakwah, politik dapat jadi digdaya dalam bingkai etika dan moral. Inilah yang dikatakan berpolitik dengan dakwah.

Dalam tulisan Syamsul Yakin, secara kritis, berdakwah melalui politik berbeda dengan berpolitik melalui

dakwah. Syamsul Yakin mengutip dari F Adi Kusumo, unsur utama frasa ini adalah berdakwah. Dalam konteks ini, dakwah berada dalam bingkai idealisme, yakni menyebarkan kebaikan ajaran agama. Jika dakwah dilakukan melalui politik, maka orientasinya adalah berbagai keuntungan dan kebaikan untuk masyarakat dan mendapat ridha Allah *SWT*. Jika seseorang berdakwah melalui politik lalu memperoleh jabatan dan kekuasaan tertentu, maka hal ini adalah amanah dan semata-mata untuk memperluas kawasan dakwah.

Sedangkan frasa kedua, yakni berpolitik melalui dakwah, aspek politik lebih diutamakan dibanding dengan aspek dakwah. Seseorang yang melancarkan gerakan berpolitik melalui dakwah kerap kali menggunakan berbagai atribut dakwah dalam melakukan lobi-lobi politik. Di sini kekuasaan politik menjadi tujuan utama berdakwah. Akibatnya, kebijakan dan arah perjuangannya dapat tiba-tiba berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada agar cita-cita politik yang bersangkutan dapat berada di lingkaran kekuasaan, mendapat simpati masyarakat, termasuk hal lain yang mengokohkan kepentingan politiknya dengan kendaraan dakwah (Syamsul Yakin, 2019: 59-60).

Pendekatan dakwah melalui jalur politik dapat dilakukan sepanjang ia membawa kemanfaatan dalam perkembangan dakwah Islamiyah, sesuai dengan prinsip *tasharruf al-*

imam manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemimpin haruslah berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat). Pendekatan dakwah melalui jalur politik, menurut Samsul Munir Amin pada dasarnya dilakukan melalui dua strategi; pertama, pendekatan Islam struktural, yakni Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat berdasarkan pada gagasan bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Dalam prakteknya, pergerakan struktural ada yang dilakukan secara radikal pemberontakan dengan cara menentang kekuasaan dan pemerintahan yang dianggap tidak sejalan. Ataupun dengan cara konstitusional di dalam parlemen dengan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bentuk kebijakan dan perundang-undangan. Apalagi bila dikaitkan dengan keinginan sebahagian umat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam yang dikenal dengan gerakan *i'adatul Islam*. Dalam gerakan ini ada yang mengambil pola *tatbiq al-syari'ah*, yakni penerapan syariat Islam dalam perundang-undangan negara yang nantinya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Dudung Abdul Rahman, 2018: 49).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, dimana fokus analisisnya yaitu pada proses penyimpulan dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari

sumber data yang telah diamati, yaitu buku, jurnal, artikel dan sumber tulisan lainnya. Penelitian termasuk kedalam jenis studi sejarah melalui studi dokumen atau teks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosio-historis. Pendekatan normatif yaitu sebuah pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum (*fiqh*) yang berlaku sebagai upaya penegasan. Pendekatan normatif ini dilakukan karena politik Islam termasuk kedalam bagian kajian hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyasa* (ilmu fiqh yang mengkhususkan pada bidang politik). Pendekatan sosio-historis menyatakan setiap produk pemikiran merupakan hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.

Setelah menentukan sumber-sumber prioritas dan penunjang, kemudian mulai mengumpulkan dan menghimpun data dari lokasi-lokasi pencarian data yang ada. Lokasi pencarian data yaitu perpustakaan, situs-situs jurnal dan penelitian lainnya, termasuk perpustakaan digital dan tempat lain yang menunjang ketersediaan data yang diperlukan seperti toko buku. Sumber data berupa karya tulis baik buku dan tulisan lainnya, dalam bentuk buku atau tulisan fisik maupun sumber data digital. Setelah data-data terkumpul, maka tahap berikutnya yang dilakukan adalah membaca data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mohammad Natsir

Mohammad Natsir (1908-1993) adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran dan gerakan dakwah di Indonesia. Natsir merupakan seorang negarawan sekaligus seorang pelaku sejarah negara Indonesia modern. Natsir tidak hanya seorang pemikir, namun juga seorang politikus. Natsir adalah seorang tokoh rendah hati yang pernah memimpin Partai Politik Islam (PII) Masyumi. Dalam karirnya sebagai seorang negarawan, Natsir pernah menjadi seorang Perdana Menteri di masa Soekarno. Perjalanan dakwahnya yang paling menonjol adalah Ketika Natsir menjadi pelopor berdirinya organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Natsir memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya. Natsir masuk sekolah diniyah di Solok saat sore hari dan malam hari Natsir belajar mengaji Al-Qur'an di surau. Ketertarikan dan pengetahuan Natsir terhadap agama semakin besar ketika Natsir berguru pada Ahmad Hasan yang merupakan seorang tokoh Persatuan Islam (PERSIS).

Mohammad Natsir mulai masuk kedalam dunia politik sejak Natsir menjadi anggota Partai Islam Indonesia pada awal tahun 40-an, saat itu Natsir memimpin organisasi Majelis Al-Islam A'la Indonesia (MIAI). Saat itu kiprah organisasi MIAI sangat meningkat dibawah kepemimpinan Natsir. Dalam masa itu pula, terbentuklah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)

yang menjadi salah satu wadah perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Kiprah politik Natsir meningkat saat Natsir tergabung dalam Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945-1946. Kiprah terbesar Natsir dalam politik yaitu saat Indonesia terbagi menjadi negara serikat, Natsir hadir dengan solusinya melalui mosi integral Natsir.

Aktifitas Mohammad Natsir dalam sejarah Indonesia dilatarbelakangi oleh sosialisasi intelektual dan keagamaan Natsir, selain itu juga karena adanya tantangan dari beberapa aliran pemikiran, baik dari kalangan orientalis Belanda ataupun dari tokoh nasionalis yang menurut Natsir cenderung sekuler yang pada saat itu berusaha untuk memojokkan Islam dan ingin menghidupkan lagi zaman pra-Islam. Hal-hal tersebut menjadi sebab bagi Natsir untuk mengikuti jejak modernisme politik dari gurunya yang lain, Agus Salim dan H.O.S Tjokroaminoto. Pemikiran-pemikiran Natsir menunjukkan corak keteguhan dalam mempertahankan Islam dari berbagai serangan pihak-pihak yang menyerangnya.

Konsep Dakwah Politik Mohammad Natsir

Natsir menjelaskan dalam bukunya Fiqhud Dakwah bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah hal yang mutlak dalam suatu aktifitas dakwah untuk mencapai kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. *Amar ma'ruf nahi munkar* menjadi kewajiban

fitrah manusia yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai makhluk sosial. Menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak sekadar menyampaikan saja, tapi juga disertai syarat-syarat yaitu mencari materi yang cocok, mengetahui keadaan subyek dakwah dengan tepat, menggunakan bahasa yang bijaksana serta memilih metode yang tepat dan representatif.

Hal diatas menunjukkan bahwa makna dakwah menurut Natsir lebih kepada bagaimana penyampaian pesan dakwah Islam. Dakwah menurut Natsir, intinya adalah sebuah upaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan cara-cara yang baik, bijaksana, menggunakan metode yang tepat, serta dalam keadaan yang tepat terhadap obyek dakwah. Mencegah dari yang mungkar dan menyeru kepada kebaikan dalam pandangan Natsir tujuannya untuk mencapai kesempurnaan serta keselamatan hidup dalam tatanan hidup bermasyarakat. Natsir dalam dakwahnya tidak hanya dilakukan semata-mata murni dalam aspek keagamaan saja. Natsir melakukan aktifitas dakwahnya dalam berbagai aspek kehidupan. Dakwah Natsir ialah dakwah yang dilakukan dimulai dalam lingkup kecil seperti keluarga hingga pada lingkup paling besar yaitu dalam konteks kenegeraan, yang dilakukan Natsir dengan menggunakan pendekatan politik.

Mohammad Natsir memiliki keyakinan bahwa politik dan dakwah tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Bagi Natsir, politik merupakan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Siapapun yang berbuat baik bagi Natsir harus didukung dan siapapun yang bersikap tidak baik harus dikritik. Antara dakwah dan politik itu menyatu, tidak ada pemisahan antara keduanya. Dakwah dan politik seolah terjadi kontradiksi, namun pada dasarnya dakwah adalah kegiatan untuk menyeru serta mengajak orang kepada kebaikan. Politik sendiri lebih cenderung berurusan dengan banyak orang. Bagi Natsir, pada dasarnya politik adalah sebuah aktifitas dakwah. Natsir mengikuti kepemimpinan ideal Rasulullah SAW. Dalam aktifitas dakwah politik, Mohammad Natsir melakukannya dengan konsep modernisme politik Islam, untuk menjadi penghubung antara dakwah dan politik. Istilah modernisme politik Islam adalah wujud sikap dan pandangan Natsir yang berusaha untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran kerohanian, sosial serta politik Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, tentu dengan tetap mengikuti perkembangan zaman serta peradaban umat manusia.

Dalam konsep dakwah politik Natsir, umat Islam diwajibkan untuk berpolitik sebagai sebuah sarana untuk menjalankan dakwah Islam. Menurut Natsir, sebagai seorang politikus umat Islam tidak bisa terlepas diri

ideologi Islam. Karena tujuan untuk menegakkan Islam itu dimulai dari upaya menegakkan masyarakat hingga menegakkan negara, sehingga semua umat Islam harus turut serta didalamnya. Natsir dalam kegiatannya, menggunakan kekuatan politik untuk berdakwah *amar ma'ruf nahi munkar* (Siti Nur Fadlila, 2019: 19-21).

Tendensi konsep modernisme politik Islam dalam aktifitas dakwah politik Natsir memiliki ciri elastis dan fleksibel yang berbeda dengan konsep pemikiran Islam yang tradisional atau fundamental, kontekstual yaitu aplikatif terhadap ajaran Islam, akulturatif yaitu adaptif dengan keadaan yang terjadi, realistis, rasional, kompromistik yang tetap berada pada batas tertentu serta berkarakter *universal*. Konsep dakwah politik Natsir ini juga banyak dipengaruhi oleh kedudukan dan keterlibatan Natsir secara langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan.

Inti dari konsep dakwah politik Mohammad Natsir menempatkan dakwah kepada penguasa menjadi prioritas. Dakwah yang Natsir lakukan kepada penguasa yaitu dengan melakukan *social support* (memberi dukungan sosial), *social control* (melakukan kontrol sosial), dan *control social participant* (partisipasi kontrol sosial). Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam pemerintahan akan dicermati oleh Natsir, yang baik akan didukung, yang tidak baik akan dikoreksi dengan baik melalui dialog.

Tidak hanya dakwah kepada penguasa, Natsir juga melakukan aktifitasnya kebawah. Dakwah kebawah Natsir lakukan dengan cara mencerdaskan dan melakukan pembinaan umat. Pembinaan umat Natsir lakukan dengan mengirim *da'i* ke daerah-daerah pelosok. Hal ini menjadi perpaduan seimbang dalam aktifitas dakwah politik Natsir, yaitu sebagai seorang politisi Islam dan juga sebagai *da'i* yang berpolitik. Mohammad Natsir selalu tegas dan pandai mencari jalan untuk tetap memperjuangkan dakwah Islam

Metode dan Strategi Dakwah Politik Mohammad Natsir

Dalam perjalanan dakwah politik Mohammad Natsir, lebih banyak Natsir lakukan ketika masih menjadi ketua partai Masyumi. Sebagai Partai Islam, tentu saja yang menjadi cita-cita besar partai adalah sesuai basis ajaran Islam. Cita-cita tersebut menjadi inti perjuangan dakwah politik Natsir yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan Masyumi. Natsir menjelaskan bahwa dalam mencapai cita-cita partai yang berlandaskan Islam, telah ditentukan garis perjuangan dalam dakwah politiknya, yaitu dengan menggunakan tiga metode perjuangan, yakni sebagai berikut:

1) Perjuangan di lapangan parlementer.

Artawijaya menerangkan, Partai Masyumi dibawah pimpinan Natsir dengan tegas menjelaskan tafsir dasarnya bahwa Masyumi

memperjuangkan cita-cita partai dengan cara dan jalan yang sah, seperti yang terbuka jalannya dalam NKRI berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Kemauan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum dalam parlemen, baik di pusat ataupun di daerah. Dibawah pimpinan Natsir, Masyumi sebagai Partai Islam berhasil mendominasi kursi parlemen dibanding dengan partai lainnya.

Sebagai partai politik, Natsir konsisten dan aktif untuk berjuang dalam menundukkan wakil-wakil dan dewan perwakilan rakyat. Selain itu, Natsir juga selalu berusaha agar berbagai kepentingan umat Islam ataupun kepentingan rakyat secara keseluruhan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Sehingga Natsir sangat menolak dan tidak setuju dengan paham atau kegiatan mengatur negara yang dilakukan dengan cara kekerasan atau pemberontakan, Natsir menempuhnya dengan jalan yang sah dan benar.

2) Perjuangan di lapangan pemerintahan.

Sama seperti partai lainnya, Natsir juga membawa Masyumi untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet atau jabatan yang lain-lain dalam pemerintahan. Hal ini bukan bertujuan untuk merebut kekuasaan dan kedudukan semata, tetapi untuk mengambil peran serta

tanggung jawab menjalankan tugas eksekutif negara. Melalui lapangan pemerintahan ini Natsir bertujuan untuk menyalurkan aspirasi politiknya yang berasaskan Islam. Masyumi memang sejak awal memang memiliki cita-cita politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

3) Perjuangan di lapangan pembinaan umat.

Perjuangan Natsir dengan metode ini dilakukan melalui penyusunan tenaga umat yang tertib untuk membangun kehidupan yang dapat mendidik akhlak, sifat dan watak. Lapangan pembinaan umat meliputi semua golongan dalam masyarakat. Pembinaan umat yang ditempuh Natsir bersama Masyumi dirumuskan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Masyumi memperjuangkan program wajib belajar bagi semua warga negara. Natsir juga mengajukan agar pendidikan agama dijadikan sebagai kurikulum wajib di sekolah, sehingga setiap murid harus diajarkan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Menindaklanjuti metode dakwah politik Natsir, implementasi strategi Mohammad Natsir dalam aktifitas dakwah politik dijabarkan oleh Nofa Nur Rahmah (2020) sebagai berikut:

1) Strategi dakwah *bil hal* (dengan perbuatan dan tindakan)

Dalam aktifitas dakwah politik Natsir, tetap dilakukan dengan memegang prinsip untuk menggunakan cara *hikmah*, yaitu dengan sikap bijaksana disertai dengan keberanian yang tegas. Wujud dakwah *bil hal* dalam aktifitas dakwah politik Mohammad Natsir antara lain adalah *mosi integral Natsir* dalam upaya penyatuan kembali NKRI di masa pasca proklamasi kemerdekaan. Selain itu juga tentu saja keterlibatan Natsir dalam jabatan pemerintahan sehingga membuat Natsir turut serta dalam pengambilan kebijakan terkait ketatanegaraan.

2) Strategi dakwah *bil qalam* (dengan tulisan)

Perjuangan Natsir dalam dakwah politik ditempuh Natsir salah satunya dengan strategi *bil qalam* atau melalui tulisan. Melalui tulisan, dakwah politik Natsir diwujudkan dengan terbitnya karya-karya Natsir baik berupa buku maupun tulisan-tulisan lain berupa artikel dan sebagainya. Tulisan Natsir yang terkenal adalah bukunya yang berjudul *Fiqhud Dakwah*, sebuah buku yang berisi pandangan Natsir terkait dakwah. Buku Natsir itu banyak dijadikan rujukan oleh para *da'i* dalam aktifitas dakwah yang dijalani. Tulisan Natsir yang lain yaitu buku-buku: *Capita Selecta jilid 1-3, Politik melalui Jalur Dakwah, di Bawah Naungan Risalah, Islam dan Akal*

Merdeka, Islam sebagai Dasar Negara, dan masih banyak lagi.

3) Strategi dakwah *bil lisan* (dengan lisan atau perkataan)

Strategi dakwah politik Natsir dalam menempuh metode-metode yang ada juga dilakukan Natsir dengan lisan atau perkataan. Dengan cara ini Natsir sering kali menyampaikan dakwahnya, termasuk yang berkaitan dengan politik. Wujud dakwah *bil lisan* Natsir yaitu ceramah atau khutbah yang dilakukan di mimbar masjid, seperti yang dilakukan Natsir ketika menyampaikan materi untuk anggota JIB. Wujud lainnya yaitu diskusi dengan rekan dakwah Natsir lintas generasi, serta pidato-pidato Natsir yang disampaikan baik dalam acara kenegaraan tingkat nasional maupun dalam skala internasional seperti pidatonya pada acara *World of Islam Festival* di London tahun 1980.

SIMPULAN

Mohammad Natsir memandang aktifitas dakwah dan aktifitas politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Menurut Natsir, politik adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan ummat muslim, termasuk dari sudut pandang dakwah. Bagi Natsir, Islam adalah multisistem, bukan hanya sebuah sistem peribadatan saja. Dalam aktifitas dakwah politik, Mohammad Natsir memiliki konsep

modernisasi politik Islam. Modernisme politik bagi Natsir dianggap dapat menunjang keberhasilan dakwah di Indonesia. Inti dari konsep modernisme politik Natsir yaitu untuk menerapkan ajaran nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun tetap menyesuaikan dan terbuka dengan perkembangan zaman.

Dalam upaya menjalankan aktifitas dakwah politik, Natsir tempuh dengan tiga metode perjuangan, yaitu perjuangan melalui lapangan parlementer atau badan perwakilan, perjuangan melalui lapangan pemerintahan serta perjuangan melalui lapangan pembinaan ummat. Melalui lapangan parlementer Natsir lakukan dengan cara memutuskan kepentingan ummat berdasarkan musyawarah sehingga menolak suatu cara mengatur negara dengan kekerasan. Melalui lapangan pemerintahan dilakukan Natsir dengan cara menyalurkan aspirasi politik yang berlandaskan Islam. Melalui lapangan pembinaan ummat dilakukan dengan bergerak melalui pendidikan, Natsir memperjuangkan undang-undang wajib belajar bagi semua warga negara sehingga pembinaan ummat dilakukan Natsir terhadap semua golongan.

Mohammad Natsir menggunakan tiga strategi untuk mencapai tujuannya dalam aktifitas dakwah politik, yaitu strategi *bil hal*, strategi *bil qalam*, dan strategi *bil lisan*. Strategi dengan perbuatan dilakukan Natsir dalam

wujud pembinaan umat melalui DDII serta tindakan lainnya seperti *mosi integral Natsir*. Strategi dakwah politik Natsir dengan tulisan yaitu melalui tulisan Natsir terkait dakwah dan politik baik berupa buku maupun artikel dalam majalah dan sebagainya. Dengan strategi perkataan dilakukan Natsir melalui ceramah, pidato atau diskusi Natsir dengan rekan dakwahnya, pidato Natsir terkait kenegaraan telah dilakukan dalam tingkat nasional dan internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Hiplunudin. (2017). *Filsafat Politik Plato dan Ariestoteles*, Yogyakarta: Cognitora
- Arif M. Ikhsan. (2017). *Beginilah Jalan Dakwah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Awaludin Pimay. (2005). *Paradigma DAKwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zurif*, Semarang: Rasail
- Ayi Sofyan. (2012). *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Dudung Abdul Rohman. (2018). *Tipologi Pergerakan Dakwah Islam di Indonesia*, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume XII No.32
- Fachruddin, Fuad Muhammad. (1988). *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Hadi Nur Ramadhan. (2021). *Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti*, Yogyakarta: Pro-U Media
- Ismail Ilyas, dan Hotman Prio. (2011). *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan*

- Peradaban Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mohammad Ali Aziz. (2004). *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Mokhammad Abdul Aziz. (2018). *Konsep Dakwah Politik dalam Al-Qur'an*, Tesis, UIN Walisongo, Semarang, 2018
- Siti Nur Fadlila. (2019). *Konsep Dakwah Politik Mohammad Natsir*, Jurnal Dakwah, Vol. 3 No. 1, E-ISSN: 2721-7183
- Syamsul Yakin. (2019). *Dakwah Politik dalam Paradigma Simbiotik*, Jurnal Komunikasi Islam, Volume 09 No.01